

**REKONSILIASI HUBUNGAN DIPLOMATIK TURKI-ARMENIA  
TAHUN 2009**

**Imelza Rizka Handayani  
dan  
Faisyal Rani, S.IP. MA**

**CP : 081265939722  
Email : imelzarizka\_ayi@yahoo.com**

***Abstract***

*This research describes the diplomatic relations between Turkey and Armenia. Especially about the reconciliation between Turkey and Armenia to create a protocol on the establishment of diplomatic relation between Turkey and Armenia. Motivation and interest of Turkey deal to create reconcile diplomatic relations with Armenia and also describes changes in the Turkish administration's foreign policy under AKP leadership and also describe approved a protocol to reconcile the relationship between Turkey and Armenia.*

*The writer collects data from books, encyclopedia, journal, massa media and websites to analyze the agreement between Turkey and Armenia to create a protocol on the establishment of diplomatic relations zone. The theories applied in this research are making decision theory from William D. Coplin and influence concept from Alvin Z. Rubinstain.*

*The conclusion of this research are the interest of Turkey make a reconciliation relations between Turkey and Armenia to create protocol on the establishment of diplomatic relation between Turkey and Armenia to increase Turkey's political capabilities in Caucasus region.*

***Key words:*** *Reconciliation, Foreign Policy, Influence Concept, and Caucasus Region.*

## Pendahuluan

Penelitian ini merupakan kajian fenomena strategi dan diplomasi yang menganalisa mengenai motivasi Turki menjalin hubungan diplomatik dengan Armenia tahun 2009. Selain itu penelitian ini juga akan membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diambil oleh Turki terhadap Armenia dan faktor-faktor yang mendorong Turki ingin merekonsiliasi hubungan dengan Armenia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan hubungan bilateral Turki dengan Armenia. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai motivasi Turki untuk merekonsiliasi hubungan terhadap Armenia dengan membuka hubungan diplomatik dan perbatasan.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku., majalah-majalah, jurnal, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Adapun rentang waktu yang peneliti lakukan yakni antara tahun 2006-2009 pada masa pemerintahan dibawah Presiden Abdullah Gul. Tahun 2006 dipilih karena pada saat itu partai AKP memenangi pemilu di Turki dengan suara mayoritas. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Penelitian dalam hal ini menggunakan perspektif pluralisme. Dalam konteks ini, paradigma pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dimana Hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor non negara termasuk pula didalamnya kelompok kepentingan dan birokrat. Pluralisme merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Menurut Viotti dan Kaupi maka paradigma pluralisme memiliki beberapa asumsi mendasar. Empat asumsi paradigma pluralisme tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, MNCs, kelompok ataupun individu.
2. Negara bukanlah unitary actor/ aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.
3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara.

---

<sup>1</sup> Paul R Viotti dan Mark Kauppi. 1997. *International Relation and World Politics: Security, economy, identity*. Prentice Hall. Inc. Hlm 275

4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau national security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain.

Dari aspek diatas dapat dilihat bahwa kebijakan Turki merekonsiliasi hubungan diplomatik dengan Armenia merupakan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama yang dibuat oleh pemerintah koalisi dan birokrasi. Semenjak kemenangan partai AKP pada pemilu 2007, Turki mengubah kebijakan dalam negerinya yang berdampak pada perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk kawasan regionalnya yaitu Kaukasus.

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa, dalam hubungan internasional negara sering kali yang menjadi pembuat keputusan yang tentunya tidak bertindak sendiri-sendiri namun berperan sebagai kelompok. Hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Analisa ini berasumsi bahwa semua pembuat keputusan, di manapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Analisa ini ditekankan pada perilaku unit negara bangsa, karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku unit negara bangsa.<sup>2</sup> Untuk menjelaskan kebijakan yang diambil Turki untuk menormalisasi hubungan dengan Armenia, peneliti menggunakan konsep dasar pengaruh dan politik luar negeri serta teori pengambilan keputusan luar negeri, karena kasus ini berhubungan dengan pembuatan kebijakan luar negeri. Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Pengaruh dinyatakan oleh kemampuan untuk memengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *outcomes*.<sup>3</sup>

Menurut Rubinstein asumsi-asumsi dasar konsep pengaruh,<sup>4</sup>

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh lebih dapat diidentifikasi daripada diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi). Sejumlah konsep pengaruh dapat diidentifikasi hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.
3. Jika pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi B.
4. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variabel yang ada di antara negara-negara. Model yang paling baik adalah untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama.

Pengaruh dapat dijalankan melalui enam cara, yaitu:

---

<sup>2</sup> *Ibid* ., hal 41.

<sup>3</sup> Daniel S. Paap, *Contemporary International Relations: A Framework for Understanding*, (New York: Mac Millan Publishing Co., 1988), hal. 365

<sup>4</sup> Alvin Z. Rubinstein, *Soviet and Chinese Influence in The Third World*, (New York: Longman, 1986), hal. 419.

- Persuasi
- Tawaran Imbalan
- Pemberian Imbalan
- Ancaman Hukuman
- Tindakan hukumna tanpa kekerasan
- Kekerasan

Pengaruh yang dimiliki oleh Turki untuk merekonsiliasi hubungan dengan Armenia dapat dilihat dari asumsi-asumsi di atas. Turki sebagai negara besar yang memiliki sistem militer yang baik serta didukung dengan perekonomian yang maju membuat Armenia tidak dapat mengajukan konsesinya terhadap Turki. Sistem perekonomian Armenia yang terpuruk akibat embargo yang dilakukan oleh Turki selama ini menjadikan Armenia sebagai negara yang lemah. Dengan terjalinnya hubungan bilateral antara Turki dan Armenia dapat memudahkan Armenia dalam melakukan kegiatan perekonomian.

Politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam dunia internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek-aspek eksternal (internasional), tetapi aspek-aspek internal (domestik) suatu negara.<sup>5</sup> Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.<sup>6</sup>

Tujuan kebijakan luar negeri merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara,<sup>7</sup> yaitu:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middle-term*), dan jangka panjang (*long-term*)
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara terhadap negara lain.

Berdasarkan pendapat K.J. Holsti dalam mengklasifikasi tujuan politik luar negeri suatu Negara, maka tujuan Turki merekonsiliasi hubungan diplomatiknya dengan Armenia dilihat dari nilainya adalah Turki ingin mengamankan wilayah perbatasannya dan dengan melakukan rekonsiliasi dengan Armenia Turki dapat menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh yang telah berlangsung lama. Tujuan jangka menengahnya adalah Turki ingin meningkatkan prestise kapabilitas politiknya sebagai mediator yang handal bagi kawasannya serta tujuan jangka

<sup>5</sup> James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W Thompson, *World Politics: An Introduction*, (New York: The Free Press. 1976), hal. 15

<sup>6</sup> James N. Rossenau, *The Scientific Study of Foreign Policy*, (New York: The Free Press. 1980), hal 171,173

<sup>7</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, (Bandung: Bina Cipta. 1992), hal 21

panjangnya ialah Turki sendiri yaitu ingin menciptakan keamanan regional di kawasan Kaukasus Selatan. Dengan terciptanya keamanan di kawasan ini dapat meningkatkan kapabilitas politik Turki serta memudahkan Turki menjadi anggota Uni Eropa.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengambilan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.<sup>8</sup> Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.<sup>9</sup> Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, Negara-negara maupun aktor dari Negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama di antaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, dan multilateral.

Rosenau mengartikan kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktifitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.<sup>10</sup> Kebijakan luar negeri menurut Rosenau ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Lebih lanjut menurut Rosenau, dalam mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita akan menemukan fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*Internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktifitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas social, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.

Menurut William D. Coplin, pengambilan suatu kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh 3 faktor determinan,<sup>11</sup> antara lain:

1. Situasi politik domestik, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku;
2. Kapabilitas ekonomi dan militer, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan;
3. Konteks internasional, meliputi pengaruh negara-negara lain atau konsentrasi politik internasional.

Pengambilan kebijakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Armenia oleh Turki dapat dilihat dari situasi politik domestik Turki yang memiliki orientasi kebijakan luar negeri yaitu “*zero problem*” atau tidak memiliki masalah dengan negara-negara tetangga menjadi faktor untuk melakukan rekonsiliasi hubungan dengan Armenia. Peran Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam memediasi serta

---

<sup>8</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 5

<sup>9</sup> Mochtar Mas'ood. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal.184

<sup>10</sup> James N. Rosenau, Gavin Byod, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal 167.

<sup>11</sup> William D. Coplin dan Charles W. Kegley, *Multi Method Introduction to International Politics*, (Chicago: Arkheim publies com, 1971), hal. 10.

mendukung rekonsiliasi hubungan Turki dan Armenia menjadi faktor konteks internasional dalam pengambilan kebijakan luar negeri Turki.

Dalam perumusan politik luar negeri terdapat berbagai pendekatan dan model-model pembuatan/perumusan politik luar negeri. Pembuatan keputusan adalah tindakan memilih alternatif yang ada dengan berbagai ketidakpastian. Asumsi dasar perspektif model strategi/rasional ini yaitu bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional dalam politik global.<sup>12</sup> Di dalam perspektif strategi, pola umum dari kesinambungan dan perubahan politik luar negeri dijelaskan berdasarkan tujuan-tujuan strategis para pembuat keputusan.

Lovel menyarankan beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa, yaitu struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Keempat faktor ini menentukan corak interaksi antar negara dalam perspektif strategi yang meliputi *leadership strategy*, *confrontation strategy*, *accomodative strategy*, dan *concordance strategy*.<sup>13</sup>

Istilah *leadership strategy* menunjukkan adanya posisi pengawasan melalui cara persuasi dan tawar-menawar daripada melalui cara kekerasan (walaupun kadangkala cara kekerasan mungkin saja dapat dikombinasikan dengan cara persuasi). Pada tipe ini suatu negara menganggap kapabilitasnya superior dan strategi negara bangsa lain sebagai pendukung.

*Concordance strategy* mengacu pada adanya suatu kepentingan yang saling menguntungkan. Namun, menyadari bahwa kapabilitasnya lebih rendah daripada negara A, maka para pembuat keputusan negara B akan berusaha menjalin hubungan yang harmonis dengan negara A dengan cara menghindari pembuatan kebijakan luar negeri yang dapat menimbulkan konflik dengan negara A, dan negara B akan bertingkah laku selaras dengan inisiatif-inisiatif negara A.

*Confrontation strategy* mengacu pada negara A akan mencoba untuk mempertajam isu-isu yang mengandung konflik kepentingan negara B, dan memaksa negara B untuk memodifikasi posisinya melalui pengakuan terhadap superioritas kapabilitas negara A. Di lain pihak, dengan adanya pengakuan negara B terhadap superioritas negara A, maka diharapkan negara B akan mencoba untuk membuat strategi penyesuaian-penyesuaian (*accomodation strategy*) untuk menghindari konflik, meskipun ada kemungkinan di masa yang akan datang negara B akan menerapkan strategi konfrontasi (*confrontation strategy*) ketika kapabilitas negara B meningkat.

Turki menggunakan *leadership strategy* dalam melakukan rekonsiliasi hubungan dengan Armenia. Turki menganggap negaranya superior yang didukung dengan kapabilitas yang dimiliki oleh negaranya, sedangkan Armenia negara yang lemah sehingga Armenia mau untuk melakukan rekonsiliasi hubungan dengan Turki. Banyak negara-negara lainnya yang mendukung upaya Turki untuk merekonsiliasi hubungan diplomatiknya dengan Armenia, hubungan yang digunakan ialah persuasi yang ingin membuka hubungan bilateral di berbagai bidang dan pembukaan perbatasan.

---

<sup>12</sup> Lloyd Jensen, *Explaining Foreign Policy*, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1982), hal. 5

<sup>13</sup> John P. Lovel, *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970), hal. 98-101.

Penandatanganan rekonsiliasi hubungan Turki dan Armenia jika dikaji merupakan kemampuan (*interest*) negara Turki sebagai sebuah negara yang berdaulat. Turki dibawah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan melakukan perubahan dengan orientasi kebijakan luar negeri dengan memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangganya. Selain itu, penandatanganan rekonsiliasi hubungan ini merupakan wujud kepentingan nasional Turki yang ingin meningkatkan peran politiknya di daerah Kaukasus Selatan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kaukasus wilayah yang sampai saat ini merupakan bagian dari bekas wilayah ruang politik Uni Soviet (sekarang Rusia), arena antar-hubungan dan bentrokan antara perbedaan geopolitik dan kepentingan ekonomi.<sup>14</sup> Tidak seperti daerah lain dari bekas Uni Soviet (sekarang Rusia), seperti negara-negara Baltik, Asia Tengah dan bagian barat Negara Slavia, hukum dan status politik di wilayah Kaukasus adalah heterogen. Kaukasus bukanlah merupakan kawasan yang terintegrasi dalam indera politik, hukum maupun sosial ekonomi.

Wilayah Kaukasus terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Kaukasus Tengah (Armenia, Azerbaijan dan Georgia), Kaukasus Utara (beberapa selatan otonom republik Rusia), dan Kaukasus Selatan (beberapa utara provinsi Iran dan Turki). Kaukasus Utara adalah bagian dari Federasi Rusia, sementara tiga republik independen Kaukasus (Armenia, Azerbaijan dan Georgia) memiliki berbagai jenis hubungan dengan Rusia. Armenia telah menikmati dukungan luas dari Rusia, sedangkan Azerbaijan dan Georgia, yang jelas menyatakan orientasi mereka telah terguncang oleh konflik domestik dan etnis minoritas mereka telah menikmati dukungan dan perlindungan dari Moskow. Bagian ketiga dari Kaukasus, Kaukasus Selatan, terdiri dari beberapa provinsi utara Iran dan Turki.

Nilai Geostrategis wilayah Kaukasus karena adanya sumber daya hidrokarbon dan fakta bahwa wilayah ini merupakan koridor transportasi di mana minyak Asia Tengah dan gas alam dapat dikirim ke pasar dunia, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara-negara telah dalam proses mencapai kemerdekaan adalah salah satu dari alasan yang telah menarik perhatian ilmiah dan politik untuk wilayah ini.<sup>15</sup> Semua negara-negara yang memiliki kepentingan dan saham di Kaukasus - terutama Rusia, Turki, Iran, dan Amerika Serikat, serta negara-negara dari Eropa dan Asia telah mengembangkan tentang pandangan dan perspektif pengembangan wilayah mereka sendiri.

Langkah pertama menuju integrasi bangsa-bangsa di wilayah Kaukasus terbentuk pada akhir abad kedelapan belas sebagai respon terhadap kebijakan ekspansi Kekaisaran Rusia. <sup>16</sup> Hal ini mengakibatkan perang antara Rusia-Kaukasia yang panjang dan melelahkan di mana bangsa Kaukasus Utara bersama-sama berperang untuk kemerdekaan. Usaha ambisius pertama untuk mencapai tujuan ini adalah suatu gerakan yang diluncurkan oleh Sheikh Mansur pada pada

---

<sup>14</sup> Yalowitz, K.S., and S. Cornell. 2004. *The critical but perilous Caucasus*. Orbis, A Journal of World Affairs 48, no. 1: 105–16.

<sup>15</sup> Ismalova, Eldar and Vladimer Papava. 2008. *A New Concept for Caucasus*, Southeast European and Black Sea Studies: Vol. 8, No. 3. Hal 283-298.

<sup>16</sup> Breyfogle, N.S. 2005. *Heretics and colonizers: Forging Russia's empire in the south Caucasus*. Ithaca: Cornell University Press.

1785, yang gagal untuk mengintegrasikan bangsa Kaukasus. Syekh Shamil yang kemudian berhasil mendirikan kurang lebih kesatuan etno-religius stabil di Kaukasus Utara, disebut Imamah, yang ada pada tahun 1834-1859.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, seperti di awal abad kedua puluh, tiga baru negara merdeka Armenia, Azerbaijan dan Georgia muncul. Pada saat yang sama, muncul perjuangan untuk kemerdekaan di Kaukasus Utara. Gerakan ini dipimpin oleh Chechnya, yang memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1992.<sup>17</sup> Ikhtisar sejarah singkat dari upaya untuk mengintegrasikan Kaukasus menunjukkan bahwa secara langsung berhubungan dan dipengaruhi oleh perkembangan di Rusia. Pengaruh Moskow di kawasan ini dan upaya-upaya yang dihasilkan untuk mengintegrasikan wilayah ini telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan masyarakat rentan di wilayah ini.

Turki adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Luas wilayahnya sekitar 779.452 km<sup>2</sup> yang terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan Daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegean di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan sebagai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki disebut sebagai wilayah Eurasia atau negara transkontinental.

Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan antara Timur dan Barat. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Usmani dan pengaruh negara-negara Barat Modern. Hingga saat ini bangunan-bangunan bersejarah masa Bizantium masih banyak ditemukan di Istanbul dan kota-kota lainnya di Turki. Yang paling terkenal adalah Aya Sofya, suatu gereja di masa Bizantium yang berubah fungsinya menjadi mesjid pada masa Khalifah Usmani dan sejak pemerintahan Mustafa Kemal hingga kini dijadikan museum.

Turki dan Armenia merupakan negara dengan perbedaan persepsi sejarah dan dipisahkan dengan ditutupnya perbatasan untuk perjalanan dan perdagangan. Puncak ketidaksetujuan mereka dilatarbelakangi oleh persepsi peristiwa nasional yang terjadi pada akhir Kekaisaran Ottoman.

Pada masa-masa akhir Kekaisaran Ottoman pada tahun 1915 hingga 1922, sebagian besar dari penduduk Armenia yang tinggal di Anatolia "hilang". Hal ini kemudian dikenal sebagai pembantaian orang Armenia atau Genosida Armenia,<sup>18</sup> yang diyakini oleh orang-orang Armenia dan sebagian besar sejarawan barat sebagai pembunuhan massal yang didukung atau dilakukan oleh pemerintahan suatu negara. Namun otoritas Turki membantah hal ini dan berkeras bahwa angka kematian yang terjadi adalah akibat dari perang sipil dan diperparah dengan penyebaran wabah penyakit dan kelaparan dan korban berjatuh dari kedua belah pihak.

---

<sup>17</sup> Lapidus, G.W. 1998. *Contested sovereignty: The tragedy of Chechnya*. International Security: Vol. 23, No. 1. Hal 5-49.

<sup>18</sup> Robert Melson. *Revolution and Genocide: On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.



Sejak itu, Kekaisaran Turki Utsmani menjajah dan berupaya melakukan “pembersihan” etnik Armenia. Selama bertahun-tahun operasi pembersihan etnik ini terbentang antara 1894 – 1922. Pada tahun 1914, imperium Turki Utsmani mengeluarkan semacam ketentuan. Seluruh laki-laki Armenia yang berusia antara 18 – 60 tahun dimobilisasi, untuk menghadapi Perang Dunia I. Mereka dijadikan pasukan tanpa senjata, kemudian dibantai oleh tentara Turki atau komandan mereka sendiri. Puncak genosida itu terjadi pada tanggal 24 April 1915. Kementerian dalam negeri Turki memerintahkan untuk menahan pemimpin politik Armenia. Mereka yang dicurigai berkhianat (ribuan orang) dibantai tanpa proses peradilan. Sisanya di deportasi ke Eufkrat dan kota Damaskus.

Kondisi waktu itu semakin memburuk. Anak-anak dan wanita ditelantarkan tanpa air dan pangan di gurun pasir. Mereka dibiarkan mati oleh kebiadaban tentara Turki dan orang Kurdi. Penderitaan yang mereka alami luar biasa. Orang Armenia menyebutnya dengan istilah “Golgotha”. Wanita diperkosa dan dibunuh, laki-laki dibantai secara massal. Sisanya mati karena kelaparan, penyakit dan bunuh diri.

Perkiraan angka jumlah penduduk Armenia yang terbunuh berkisar dari 650.000 hingga 1.500.000 dan kejadian ini diperingati setiap tahun pada tanggal 24 April. Daerah pembantaian meliputi Armenia (Assyiria) di tenggara Turki (Mesopotamia kuno). Anak-anak pun tak luput dari pembantaian itu. Bocah perempuan dijual dan dipaksa menikah dengan orang Kurdi. Yang lainnya kerja paksa membangun rel kereta api, menggali dan memecah batu gunung Tarsus.

Rakyat Armenia dan beberapa negara lainnya di dunia telah berkampanye selama 30 tahun agar kejadian ini diakui sebagai tindakan genosida yang brutal, namun banyak negara lain memberikan tekanan pada gerakan ini dan tidak ingin mengakui secara sah bahwa pembantaian massal di Armenia digolongkan sebagai genosida.<sup>19</sup>

Hubungan antara pejabat Turki dan Armenia dimulai setelah Turki mengakui kemerdekaan Armenia pada awal tahun 1990-an. Pada Desember 1992, Pejabat Armenia melakukan perjalanan darat untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri Dewan Kerjasama Ekonomi Kawasan Laut Hitam (BSEC) di Antalya. Menteri Luar Negeri Turki telah mengatur perjalanan mereka dari Erzerum, ke Antalya. Menteri Luar Negeri Armenia, Arman Kirakossian, mengadakan pertemuan ramah dengan Menteri Luar Negeri Turki Hekmit Çetin. Mereka bergabung dengan menteri luar negeri Azerbaijan untuk melakukan pertemuan trilateral. Hubungan yang konstruktif dan berkelanjutan dipertahankan antara Pejabat Armenia dan Duta Besar Turki untuk Rusia, Volkan Vural, yang berfungsi sebagai utusan Ankara pada isu-isu Armenia.<sup>20</sup>

Memburuknya permusuhan antara Armenia dan Azerbaijan menyebabkan berakhirnya pemulihan hubungan Turki dan Armenia. Azerbaijan merupakan sekutu Turki memprotes atas tindakan Armenia yang menempati wilayah Azerbaijan dan membunuh penduduk setempat. Pada April 1993, Turki menutup perbatasannya dengan Armenia dan hubungan diplomatiknya sebagai bentuk solidaritas Turki terhadap Azerbaijan.

---

<sup>19</sup> Kristian Ginting. *Armenian Genocide : Sejarah Yang Terlupakan*. 19 Januari 2009. Diakses dari <<http://kristianginting.wordpress.com>> pada tanggal 10 Januari 2010.

<sup>20</sup> David L. Phillip. *Diplomatic History: The Turkey-Armenia Protocols*. New York: Colombia University, 2012. Hal. 15

Menyusul kemenangan pemilu pada tahun 2002, Partai Keadilan Pembangunan Turki (AKP) memulai program reformasi yang ambisius di kedua kebijakan domestik dan luar negeri. Timur Tengah telah berubah secara dramatis selama dekade terakhir, tetapi filosofi kebijakan luar negeri pemerintah Turki tetap sama. Secara khusus, konsep "nol masalah (*zero problem*) dengan tetangga" tetap hidup dan sehat - dan lebih relevan daripada sebelumnya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi wilayah Turki.

Alasan utama untuk isolasi relatif Turki dari lingkungan yang ada hubungannya dengan kerangka yang mendominasi pola pikir elit-kebijakan luar negeri Turki selama beberapa dekade, pola pikir yang menjadi hambatan antara Turki dan tetangganya secara fisik, mental, dan politik. Pemerintah baru dibawah Partai AKP berharap untuk mengintegrasikan Turki dengan lingkungannya, dan strategi baru ini mengharuskan terobosan besar dengan budaya kebijakan luar negeri yang lama. Dalam platform yang pemilihannya, Partai AKP memutuskan untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga Turki dan mengejar kebijakan luar negeri yang lebih dinamis dan multidimensional.

Ahmed Davutoglu, Menteri Luar Negeri Turki berupaya untuk menetapkan ide-ide baru yang akan memandu kebijakan luar negeri negara Turki di era baru. Davutoglu mengusulkan bahwa kebijakan luar negeri Turki akan didasarkan pada enam prinsip utama, yaitu: keseimbangan antara keamanan dan kebebasan, masalah nol dengan tetangga, kebijakan luar negeri multidimensi, kebijakan luar negeri regional yang pro-aktif, gaya diplomasi yang sama sekali baru, dan diplomasi berirama.<sup>21</sup>

Davutoglu tidak hanya mengenalkan konsep *zero problem* dalam kebijakan luar negerinya tapi merubah kebijakan luar negerinya dari reaktif menjadi *strategic depth*. Doktrin "*Strategic Depth*" yang dirumuskan oleh Profesor Ahmed Davutoglu menegaskan bahwa Turki telah menjadi pemain kunci. Dengan memanfaatkan posisi geopolitik dan geostrategisnya, Turki ingin menjadi aktor regional dan global. Sebagai bagian dari visi ini, pemerintah Ankara bertekad menerapkan kebijakan untuk mengakhiri permusuhan jangka panjang dengan tetangganya, terutama di kawasan Timur Tengah, yang pernah dikuasai oleh Dinasti Ottoman. Pada tahun 2001, Davutoglu menuangkan pemikiran-pemikiran strategisnya dalam sebuah buku berjudul "*Stratejik Derinlik*" atau *Strategic Depth*. *Strategic Depth* telah menjadi buku referensi utama untuk memahami dasar-dasar visi kebijakan luar negeri Turki. Doktrin. Dia adalah arsitek dari dialog dengan semua aktor politik di Timur Tengah, termasuk dengan pemimpin Hamas Khaled Meshal.

Kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) turut mengubah garis kebijakan luar negeri Turki dari politik dimensional menjadi multidimensional. Menurut keyakinan Davutoglu dalam *Strategic Depth*, landasan kekuatan Turki adalah sejarah dan posisi geostrategis negara itu. Dengan kata lain, *Strategic Depth* adalah pendekatan politik luar negeri multidimensional yang berpijak pada pemahaman atas akar sejarah dan posisi geostrategis Turki. Arah dan orientasi politik luar negeri Turki yang baru telah secara signifikan mengubah lanskap politik regional.

---

<sup>21</sup> Ahmet Davutoglu; "Turkey's Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 ", *Insight Turkey*, Vol.10, No.1, 2008.

Doktrin baru itu mengubah visi Turki terkait empat isu utama yaitu; Pertama, Turki menerima statusnya sebagai negara kandidat di Uni Eropa. Dalam perspektif kepentingan Eropa, masuknya Turki dalam Uni Eropa akan melebarkan ruang pengaruh Eropa yang sebelumnya terhenti di Selat Bosporus. Kedua, Turki akan memainkan peranan sebagai katalisator bagi hubungan pihak Timur Tengah dengan Barat, selain itu Turki juga berambisi menjadi aktor utama dalam melakukan transformasi demokrasi di Timur Tengah. Karenanya Turki berupaya membangun kepercayaan politik negara-negara di kawasan. Ketiga, Turki jelas melihat pentingnya hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Moskow adalah aktor regional yang teramat penting bagi Ankara, demikian pula sebaliknya. Sementara poin keempat adalah setidaknya ada delapan negara bekas Uni Soviet yang memiliki ikatan etnisitas dan bahasa dengan Turki. Diprediksikan akan adanya ruang pengaruh Turki di kawasan Kaukasus ini ke depannya. Meskipun pada kenyataannya, ada juga Rusia dan Iran yang memiliki kepentingan yang sama di kawasan Kaukasus.<sup>22</sup>

Dari perspektif *Strategic Depth*, Turki selain mempertahankan hubungannya dengan Barat, juga menaruh perhatian khusus pada dunia Timur. Mengingat pandangan itu dilandasi pada sejarah dan posisi geostrategis, maka Turki menilai peningkatan hubungan di Asia dan perluasan pengaruh di kawasan itu sebagai strategi untuk memberbesar pengaruhnya di Eropa. Menurut Davutoglu, kepentingan strategis Turki terletak pada perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan dan sekitarnya. Davutoglu mengatakan bahwa Turki berada pada posisi yang unik dalam hal geopolitik di tengah-tengah Afro-Eurasia. Setiap krisis di kawasan – baik itu ekonomi atau politik – memiliki konsekuensi langsung bagi Turki dan masyarakat internasional yang lebih luas. Oleh karena itu, stabilitas di wilayah ini penting demi kepentingan terbaik Turki. Dengan alasan inilah, Turki aktif bekerja untuk mendorong perdamaian dan keamanan di sekitarnya. Dia menambahkan, "Melalui kebijakan ini, kami sedang mencoba untuk menghapus masalah dengan tetangga kami, kami juga mencoba untuk membantu mereka memecahkan masalah domestik, bilateral atau internasional yang mungkin mereka miliki sejauh kita bisa."<sup>23</sup>

Dalam mempercepat proses rekonsiliasi hubungan diplomatik, Turki dan Armenia banyak melakukan berbagai pertemuan atau kunjungan diplomatik serta mediasi yang dilakukan oleh Swiss mempercepat proses rekonsiliasi tersebut. Inisiatif Swiss untuk merevitalisasi hubungan antara Turki dan Armenia dikemukakan pada tanggal 16 September 2007, ketika Turki dan Menteri luar negeri Armenia memiliki pertukaran awal pada margin dari UNGA tentang keterlibatan Swiss. Michael Ambuhl, diplomat dan negosiator yang sangat dihormati menjabat sebagai Sekretaris Negara dan Kepala Direktorat Politik di Departemen Federal Swiss untuk Urusan luar Negeri adalah ujung tombak. Dia tidak memiliki riwayat keterlibatan pada isu Turki-Armenia dan tidak ada ikatan keluarga untuk kedua sisi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> "Melihat Doktrin Strategic Depth Turki." Irib Indonesia, 9 Januari 2013. Diakses dari <[http://www.iritel.com/asset\\_publisher/k028/content/id/5307262](http://www.iritel.com/asset_publisher/k028/content/id/5307262)> pada tanggal 3 Maret 2013.

<sup>23</sup> Ibid.,

<sup>24</sup> David L. Phillip. *Diplomatic History: The Turkey-Armenia Protocols*. New York: Colombia University. 2012. Hal. 27

Pertemuan di Gertzenzee (Swiss) terjadi pada bulan Juli 2008. Para pihak setuju bahwa pekerjaan mereka akan fokus pada pembentukan hubungan diplomatik, normalisasi, saling pengakuan, dan membuka perbatasan, dan penciptaan dari komisi trilateral ahli berurusan dengan dimensi historis. Ankara masuk ke dalam proses dan siap untuk pergi bersama dengan dua item pertama, asalkan item ketiga diwujudkan. Komisi sejarah adalah kepentingan utama ke Ankara. Hubungan pribadi yang didirikan antara Ambuhl, Kirakossian, dan Apakan. Kirakossian Apakan dan juga harus mengenal satu sama lain. Mereka berdua sangat kompeten, diplomat profesional. Mereka juga sangat mirip dalam temperamen.

Turki dan Armenia melakukan kunjungan kenegaraan pada kualifikasi pertandingan sepak bola atau lebih dikenal dengan *football diplomacy*. Presiden Gül adalah salah satu pemimpin asing pertama yang menghubungi Sarkisian pada kemenangannya, menulis surat ucapan selamat yang hangat. Menurut Menteri Luar Negeri Turki, hal ini mengulurkan tangan baru ke sisi Armenia. Menanggapi gerakan yang baik ini, Sarkisian mengundang Gül ke Yerevan untuk menonton pertandingan Kualifikasi Piala Dunia antara Turki dan Armenia pada tanggal 6 September 2008. Menteri luar negeri yang baru ditunjuk Sarkisian, Edward Nalbandian, adalah bertugas untuk mengatur pertemuan tersebut. Seorang diplomat yang berpengalaman, Nalbandian memiliki catatan sebagai seorang diplomat Soviet ke Libanon dan lima tahun bertugas di Mesir. Dia bergabung dengan Dinas Luar Negeri Armenia setelah Uni Soviet runtuh dan menjabat sebagai duta besar untuk Prancis 1999-2008. Sarkisian dan Nalbandian secara kualitatif berbeda dari para pendahulu mereka. Sementara Kocharian dan Oskanian yang reaktif, Sarkisian dan Nalbandian lebih berpengalaman dan strategis dalam kepentingan kemajuan Armenia. Mereka mengangkat diplomasi Armenia ke tingkat yang lebih tinggi, menempatkan masalah pada agenda kekuatan-kekuatan besar. Pendekatan pro-aktif mereka menyebabkan penandatanganan Protokol, yang merupakan terobosan dalam hubungan Turki-Armenia.

Turki dan Armenia berusaha memulai hidup yang baru dengan menandatangani nota kesepakatan rekonsiliasi hubungan kedua negara setelah terlibat dalam konflik historis selama satu abad. Perjanjian itu ditandatangani oleh Menlu Turki dan Armenia dengan mediasi Swiss, pada 10 Oktober 2009 di Zurich, Swiss. Menlu Amerika Serikat, Perancis dan Rusia, serta Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Javier Solana, juga menghadiri acara penandatanganan tersebut<sup>25</sup>.

Kesepakatan yang ditandatangani di Zurich pada 10 Oktober 2009 antara Turki dan Armenia untuk membangun hubungan diplomatik memberikan harapan bahwa beberapa dari masalah-masalah sulit di Kaukasus, seperti konflik Armenia-Azerbaijan dapat diselesaikan. Penandatanganan Pakta perjanjian ini adalah awal dari pemulihan kedua musuh bebuyutan yang selama berpuluh-puluh tahun bertikai. Tentu dengan penandatanganan tersebut akan ada upaya ke arah perdamaian di wilayah Kaukasia tersebut meski perjanjian tersebut tidak serta merta menghapus permusuhan yang ada selama berpuluh tahun.

Melalui Protokol dan lampiran, Turki dan Armenia menyetujui untuk:

---

<sup>25</sup> Chairul Akhmad. "Musnahnya Kesumat Seabad". Sabili, 22 Oktober 2009. Diakses dari <<http://www.sabilicyber.com>> pada tanggal 10 Januari 2010.

1. Membangun hubungan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 dan untuk bertukar misi diplomatik.
2. Buka perbatasan bersama dalam waktu dua bulan setelah berlakunya Protokol Normalisasi Hubungan.
3. Melakukan konsultasi politik reguler antara Departemen Luar Negeri kedua negara.
4. Membuat penggunaan terbaik dari transportasi yang ada, komunikasi, dan infrastruktur energi dan jaringan antara kedua negara, dan untuk melakukan tindakan dalam hal ini.
5. Mengembangkan kerangka hukum bilateral dalam rangka mendorong kerjasama antara kedua negara.
6. Bekerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan mendorong hubungan antara lembaga-lembaga yang sesuai, serta mempromosikan pertukaran spesialis dan mahasiswa, dan bertindak dengan tujuan melestarikan budaya warisan dari kedua belah pihak dan meluncurkan proyek budaya umum.
7. Membangun kerjasama konsuler sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler tahun 1963 dalam rangka untuk memberikan bantuan yang diperlukan dan perlindungan kepada warga kedua negara.
8. Mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengembangkan perdagangan, pariwisata, dan kerjasama ekonomi antara kedua negara.
9. Terlibat dalam dialog dan memperkuat kerjasama tentang isu-isu lingkungan
10. Melaksanakan dialog pada dimensi sejarah dengan tujuan untuk memulihkan rasa saling percaya antara kedua negara, termasuk tentang pemeriksaan ilmiah catatan sejarah dan arsip untuk menentukan ada masalah dan merumuskan rekomendasi.<sup>26</sup>

Turki ingin menormalkan hubungan bilateral dengan Armenia dalam rangka memberikan kontribusi terhadap suasana damai dan kerjasama di Kaukasus Selatan yang komprehensif. Dengan tujuan ini dalam pikiran, Turki mulai secara sepihak menerapkan langkah-langkah pembangunan kepercayaan tertentu. Dalam kerangka keinginan kami untuk menormalkan hubungan kami dan penyelesaian masalah bilateral kami dan sebagai hasil dari proses negosiasi yang difasilitasi oleh Swiss, "Protokol Pembukaan Hubungan Diplomatik" dan "Protokol Pengembangan Hubungan" antara Turki dan Armenia pada 10 Oktober 2009 di Zurich. Kedua protokol menyediakan kerangka kerja bagi normalisasi hubungan bilateral.

Protokol telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk diratifikasi. Pemerintah Armenia di sisi lain, pada peraturan yang relevan, pertama kali dikirim protokol untuk Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk memiliki konstitusionalitas mereka harus disetujui. Akibatnya, Mahkamah menemukan protokol untuk menjadi sepadan dengan Konstitusi Armenia dengan pernyataan yang beralasan, yang mengandung unsur bertentangan dengan surat dan semangat dari Protokol. Setelah itu, protokol yang diserahkan kepada Parlemen Nasional

---

<sup>26</sup> Op.cit., Hal. 59

Armenia. Pada tanggal 22 April 2010 Presiden Armenia H.E. Mr Sargsyan membuat pernyataan dalam pidato televisinya menanggukkan proses ratifikasi Protokol.

Turki tetap berkomitmen untuk melakukan proses normalisasi depan menunggu munculnya kondisi politik yang kondusif di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Turki, sebagai anggota OSCE Minsk Group, dan negara di kawasan itu, terus mendukung upaya ke arah penyelesaian damai dari konflik Nagorno-Karabakh. Turki bekerja pada ide-ide kreatif agar proses negosiasi NK akan mendapatkan momentum baru. Turki adalah pendapat bahwa peluang kerjasama regional akan mendorong pihak-pihak menuju pemukiman. Kami sangat percaya bahwa jika semua pihak yang berkepentingan menampilkan kemauan politik yang diperlukan, dan didorong ke arah yang benar, harapan kita untuk perdamaian yang komprehensif di Kaukasus Selatan pasti akan terwujud.

### **Simpulan**

Hubungan Turki dan Armenia tidak berjalan baik karena konflik yang terjadi diantara keduanya yang menyebabkan memburuknya konflik ini akibat proses negosiasi antara kedua belah pihak saat mereka mendiskusikan modalitas membangun hubungan diplomatik dan akhirnya menyebabkan seluruh penutupan perbatasan antara Turki-Armenia. Namun demikian, proses berjalan dengan baik untuk kedua belah pihak di awal. Turki mengakui kemerdekaan Azerbaijan pada 9 November 1991, dan satu bulan kemudian, pada 16 Desember, arena internasional menyaksikan pengakuan semua negara eks-Soviet lainnya oleh Turki tanpa diskriminasi. Setelah pengakuan negara-negara Kaukasia baru, Turki menjalin hubungan resmi dengan Georgia dan Azerbaijan, dan kontak pertama dengan Armenia terjadi di suasana cukup positif. Dengan demikian, setelah pengakuan Armenia pada bulan-bulan pertama tahun 1992, Turki ditunjuk sebagai duta untuk kantor perwakilan diplomatik di Yerevan yang akan dibuka dalam waktu dekat. Delegasi diplomatik tingkat tinggi dari kedua belah pihak mengunjungi Ankara dan Yerevan, masing-masing, untuk membahas kemungkinan kerjasama daerah serta peluang untuk perdagangan. Selain pertemuan-pertemuan awal, Turki mengundang Armenia untuk menjadi anggota pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Laut Hitam (BSEC).

Namun, meskipun banyak pertemuan dan kunjungan resmi, Turki dan Armenia tidak mampu untuk menjalin hubungan diplomatik. Proses negosiasi protokol bilateral untuk pembentukan hubungan diplomatik antara kedua negara mengalami beberapa masalah dan akhirnya menjadi buntu. Turki berpendapat bahwa Armenia tidak resmi mengakui perbatasan bersama yang ada antara kedua negara sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian Kars dan Gümrü pada 1921. Oleh karena itu, sebagai prasyarat untuk membangun hubungan diplomatik, Turki meminta pernyataan resmi menekankan bahwa negara merdeka Armenia mengakui ini perjanjian dan menghormati integritas wilayah Turki. Pemerintah Armenia tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu dan berpendapat bahwa tidak ada kebutuhan untuk sebuah deklarasi jenis ini karena tak satu pun dari kedua negara pernah mengecam treaty.

Turki ingin melakukan rekonsiliasi hubungan diplomatik dengan Armenia adalah untuk meningkatkan kapabilitas politiknya di kawasan Kaukasus. Kapabilitas Turki dapat menjadi *soft power* yang dimilikinya untuk memainkan peranan penting di kawasan tersebut. Turki menggunakan *Strategic Depth* dalam

mengimplementasikan kebijakan politik luar negerinya dan menggunakan konsep *zero problem* (nol masalah) dengan negara tetangga sebagai konsep kebijakan luar negeri Turki yang baru.

Turki dan Armenia melakukan proses rekonsiliasi hubungan diplomatik dengan bantuan mediasi yang dilakukan oleh Swiss, adanya Komisi Sejarah Bersama yang dapat melakukan pengkajian antara latar belakang sejarah Turki dan Armenia agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adanya *football diplomacy* sebagai momentum yang baik untuk memulihkan dan merundingkan kembali proses rekonsiliasi hubungan diplomatik antar kedua negara.

Akhirnya Turki dan Armenia menandatangani nota kesepakatan rekonsiliasi hubungan kedua negara setelah terlibat dalam konflik historis selama satu abad. Perjanjian itu ditandatangani oleh Menlu Turki dan Armenia dengan mediasi Swiss, pada 10 Oktober 2009 di Zurich, Swiss. Menlu Amerika Serikat, Perancis dan Rusia, serta Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Javier Solana, juga menghadiri acara penandatanganan tersebut.

### Daftar Pustaka

- Coplin, William D. dan Kegley, Charles W. 1971. *Multi Method Introduction to International Politics*. Arkheim Publies com: Chicago.
- Mas' oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES: Jakarta.
- Melson, Robert. 1992. *Revolution and Genocide: On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust*. University of Chicago Press: Chicago.
- Phillip, David L. 2012. *Diplomatic History: The Turkey-Armenia Protocols*. Colombia University: New York
- Viotti, Paul R. & Kauppi, Mark V. 1997. *International Relations and World Politics-Security, Economy, Identity*. Prentice Hall. Inc: United States.
- Davutoglu, Ahmed. 2008. *Turkey's Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007*. Jurnal Insight Turkey. Vol. 10, No. 2, Maret 2006.
- Ismalova, Eldar & Papava, Vladimer. 2008. *A New Concept for Caucasus*. Jurnal Southeast European and Blacksea Studies. Vol. 8, No. 3, Juni 2008.
- Lapidus, G.W. 1998. *Contested Sovereignty: The Tragedy of Chechnya*. Jurnal International Security. Vol. 23, No. 1.
- Yalowitz, K.S. and S, Cormell. 2004. *The Critical but Perilous Caucasus*. Orbis, A Journal of World Affairs. Vol. 48, No.1.
- Akhmad, Chairul. "Musnahnya Kesumat Seabad". Sabili, 22 Oktober 2009. Diakses dari <<http://www.sabilicyber.com>> pada tanggal 10 Januari 2010.
- "Melihat Doktrin Strategic Depth Turki." Irib Indonesia, 9 Januari 2013. Diakses dari <[http://www.irib.ir/telisik/-/asset\\_publisher/k028/content/id/5307262](http://www.irib.ir/telisik/-/asset_publisher/k028/content/id/5307262)>